

Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Mojokerto : Studi Pada Desa Wisata Kampung Majapahit Bejijong Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto

Shelly Regeta Febriani, Muhammad Farid Ma'ruf

¹² Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya

ARTICLE INFO

Article history:

Received July 01, 2025

Revised July 10, 2025

Accepted July 13, 2025

Available online July 13, 2025

Keywords:

Role, Village Government, Kampung Majapahit Bejijong Tourism Village, Mojokerto Regency

Kata Kunci:

Peran, Pemerintah Desa, Desa Wisata Kampung Majapahit Bejijong, Kabupaten Mojokerto



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

Pariwisata menjadi sektor strategis dalam pembangunan ekonomi karena mendorong pertumbuhan, membuka lapangan kerja, dan memberdayakan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Mojokerto fokus pada pengembangan desa wisata, termasuk di Desa Wisata Kampung Majapahit Bejijong yang memiliki potensi budaya dan sejarah sebagai daya tarik utama. Namun, masih terdapat kendala seperti pengelolaan yang belum optimal, konflik internal, dan minimnya fasilitas. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pemerintah desa dalam pengembangan desa wisata secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan mendeskripsikan peran pemerintah Desa Bejijong dalam pengembangan desa wisata kampung majapahit Bejijong Kabupaten Mojokerto. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Lokasi penelitian berada di Desa wisata kampung majapahit Bejijong. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles

dan Huberman dalam Sugiyono (2022), yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Peran pemerintah desa dianalisis menggunakan enam indikator dari Ife dan Tesoriero, (2005) dalam Susanti, (2015): Peran dalam animasi sosial, mediasi dan negosiasi, pemberi dukungan, fasilitasi kelompok, pemanfaatan sumber daya dan keterampilan, dan mengorganisasi. Hasil menunjukkan Pemerintah Desa Bejijong berperan aktif, terutama peran dalam mediasi dan pemberi dukungan. Namun, tantangan, seperti rendahnya partisipasi masyarakat, kelemahan dalam memfasilitasi, serta kurangnya promosi dan digitalisasi yang efektif. Kesimpulannya, peran pemerintah desa belum sepenuhnya optimal dan merata pada semua aspek, sehingga perlu penguatan pemberdayaan dan strategi keberlanjutan.

ABSTRACT

Tourism is a strategic sector in economic development because it drives growth, creates jobs, and empowers communities. The Mojokerto Regency Government is focusing on developing tourist villages, including the Kampung Majapahit Bejijong Tourist Village, which has cultural and historical potential as its main attractions. However, there are still challenges such as suboptimal management, internal conflicts, and insufficient facilities. Therefore, the active role of the village government is needed in the sustainable development of tourist villages. This study aims to identify and describe the role of the Bejijong Village Government in the development of the Kampung Majapahit Bejijong tourist village in Mojokerto Regency. The method used is qualitative descriptive with a case study approach, through observation, documentation, and interviews. The research location is in the Kampung Majapahit Bejijong Tourism Village. Data analysis was conducted using the interactive model of Miles and Huberman in Sugiyono (2022), namely data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The role of the village government was analyzed using six indicators from Ife and Tesoriero (2005) in Susanti (2015): role in social animation, mediation and negotiation, support provider, group facilitation, utilization of resources and skills, and organization. The results show that the Bejijong Village Government plays an active role, particularly in mediation and support provision. However, challenges include low community participation, weaknesses in facilitation, and insufficient promotion and effective digitalization. In conclusion, the role of the village government is not yet fully optimal and equitable across all aspects, necessitating strengthened empowerment and sustainable strategies.

*Corresponding Author

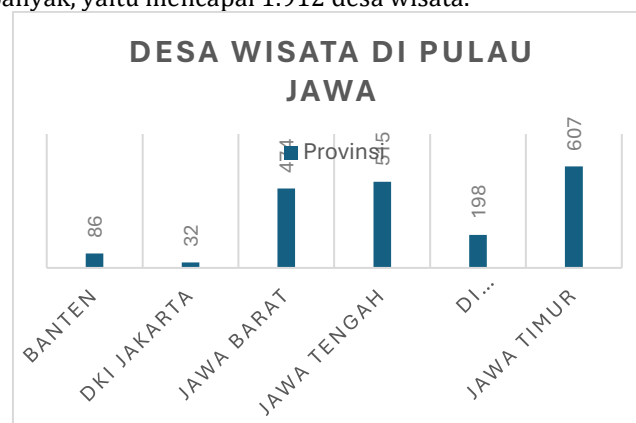
Email: shellyregeta.21017@mhs.unesa.ac.id, muhammadfarid@unesa.ac.id

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu sektor pilar utama yang mendukung pembangunan nasional di Indonesia karena telah berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Pariwisata meliputi seluruh aspek yang berhubungan dengan kegiatan perjalanan wisata, termasuk pengelolaan objek dan daya tarik wisata, serta berbagai bentuk usaha yang mendukung aktivitas di sektor tersebut (Fandeli Chafid, 2001). Berdasarkan Undang-Undang Kepariwisataan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata, menyebutkan pariwisata merupakan berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Sehingga pariwisata mengutamakan nilai kesejahteraan masyarakat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas dengan pembangunan kepariwisataan yang komprehensif dan berkelanjutan. Oleh karena itu menurut pandangan Yoeti (2008) bahwa pariwisata merupakan kegiatan lintas sektor yang terhubung dengan berbagai aspek pembangunan, sehingga berpotensi menjadi sumber pembiayaan alternatif dalam mendukung pembangunan daerah. Salah satu strategi yang dapat dijalankan oleh pemerintah adalah dengan mengoptimalkan dan memanfaatkan sektor pembangunan untuk memperhatikan dan meningkatkan potensi pariwisata diseluruh daerah.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia juga sangat berperan dalam mendorong kemajuan pariwisata dengan melihat potensi pembangunan destinasi pariwisata pedesaan. Pengelolaan wisata berbasis pedesaan secara berkelanjutan memiliki potensi besar untuk memberikan nilai tambah di berbagai aspek, seperti ekologi, pendidikan, sosial budaya, rekreasi, dan ekonomi. Hal ini dapat berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta membantu mengurangi pengangguran dan kesenjangan pembangunan di wilayah pedesaan. Desa wisata adalah kawasan di wilayah pedesaan yang menyajikan suasana alami dan autentik, mencerminkan kehidupan masyarakat pedesaan baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, yang memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkan beragam unsur dalam pariwisata, seperti daya tarik wisata, tempat menginap, kuliner, serta berbagai kebutuhan pendukung wisata lainnya (Priasukmana, 2001).

Tujuan dari pembentukan desa wisata adalah mendorong partisipasi aktif masyarakat serta pihak-pihak terkait yang memiliki peran strategis dalam pengembangan sektor pariwisata. Sehingga diperlukan adanya identifikasi potensi desa dengan melihat keindahan dan keunikan alam, tradisi, dan budayanya untuk dijadikan komoditas wisata unggulan di setiap desa. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) bahwa Pulau Jawa menjadi wilayah dengan jumlah desa wisata terbanyak, yaitu mencapai 1.912 desa wisata.



Gambar 1 Desa Wisata di Pulau Jawa

Sumber : Data diolah dari Jaringan Desa Wisata Kemenparekraf 2024

Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga terus berupaya mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki guna mendorong kemajuan desa wisata di berbagai daerah. Provinsi Jawa Timur, tercatat sebanyak 607 desa wisata yang telah dikembangkan, dan salah satunya berada di wilayah Kabupaten Mojokerto. Pemerintah Kabupaten Mojokerto terus berupaya untuk mengeksplorasi dan mengembangkan potensi pariwisata yang dimiliki demi meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi wisata, serta menjadikan kawasan tersebut sebagai tujuan wisata yang kompetitif, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Langkah ini didukung dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan 2018-2033. Hingga tahun 2024, tercatat sebanyak 22 desa wisata yang telah dikembangkan. Salah satu destinasi desa wisata yang ada di Kabupaten Mojokerto adalah Kampung Majapahit Bejjijong yang berlokasi di Desa Bejjijong, Kecamatan Trowulan. Desa ini memiliki kekayaan seni dan budaya yang menonjol, serta terletak di wilayah yang dulunya merupakan pusat pemerintahan Kerajaan Majapahit.

Desa wisata kampung majapahit sebagai desa wisata unggulan di Indonesia, dikarenakan telah memberikan pengaruh positif yang luas, sekaligus menjadi inspirasi bagi desa wisata lainnya. Salah satu upaya pengembangan wisata yang menjadi ikon desa wisata tersebut adalah adanya rumah majapahit yang melintas di sepanjang pintu masuk desa wisata kampung majapahit bejijong. Dalam pengoptimalan pemanfaatan rumah majapahit tentu perlu adanya pengelola. Pengelolaan rumah majapahit tersebut dijalankan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), terdapat unit bagian di dalamnya yakni Ladewi atau Lembaga Desa Wisata. Ladewi ini mengelola diantaranya paket wisata, tour guide, homestay, dan shuttle. Dalam paket wisata tersebut terdapat beberapa trip sesuai tarif, diantaranya seperti homestay, tourguide, sepeda santai, dulin tradisional, dan destinasi wisata candi brahu, buddha tidur, petilasan siti inggil, makam Raden Wijaya, juga terdapat paket pendidikan yakni cor kuning, wayang kulit, membatik, tari, dan telur asin asap. Seperti yang disampaikan bahwa dalam pengelolaan rumah majapahit yang merupakan suatu ikon desa wisata kampung majapahit ini bertujuan untuk mendongkrak perekonomian warga yang dimanfaatkan sebagai tempat penginapan (*homestay*) sekaligus galeri yang berfungsi untuk mempromosikan produk unggulan desa. Akan tetapi, rumah majapahit ini kurang difungsikan dengan maksimal yang kemudian hanya digunakan sebagai ruang tamu. Kondisi tersebut bisa dilihat dari minimnya upaya atau peran pemerintah desa dalam mengorganisasi pelaku masyarakat untuk mengelola rumah majapahit.

Selain itu, terdapat permasalahan yang harus diperhatikan dalam pengembangan desa wisata. Seperti konflik antar kelompok dikarenakan tidak adanya pembagian hasil yang jelas dari pemerintah desa sehingga terjadi perbedaan pendapat terkait harga. Kondisi tersebut dapat dilihat dari minimnya upaya atau peran pemerintah desa dalam memediasi dan negosiasi. Selain itu, terdapat permasalahan lainnya terkait fasilitas dalam pengembangan sarana dan prasarana, seperti fasilitas toilet homestay, pusat oleh-oleh dan makanan khas yang belum dikemas secara praktis, dan kantor pusat informasi yang belum tersedia.

Dengan permasalahan yang terjadi tentunya sumber daya pelaksana yang dimiliki masih memerlukan pendampingan secara rutin dan juga terjadwal untuk menyiapkan SDM pariwisata yang berdaya saing. Dalam pengembangannya, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata memiliki peran dalam mengelola dan meningkatkan kualitas objek wisata bangunan cagar budaya atau candi. Sedangkan pemerintah desa memiliki peran langsung dalam pengelolaan desa wisata, kewenangan serta memiliki hubungan erat dengan masyarakat untuk mengembangkan desa wisata sehari-hari. Mengenai hal ini, keterlibatan aktif pemerintah desa sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada, sehingga desa wisata kampung majapahit bejijong dapat berkembang menjadi desa wisata yang unggul serta berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, terkait permasalahan dan sejauh mana keterlibatan dan kontribusi pemerintah desa dalam mengembangkan desa wisata. Penelitian ini berfokus pada peran pemerintah desa, sehingga penelitian ini berjudul "Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Mojokerto : Studi Pada Desa Wisata Kampung Majapahit Bejijong, Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang merupakan jenis penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moloeng, 2007). Sementara itu, menurut Creswell (2014) menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali dan memahami makna yang dimiliki individu atau kelompok terkait permasalahan sosial maupun kemanusiaan. Dalam hal ini, metode deskriptif kualitatif digunakan untuk mengungkapkan fakta dan realita yang berada di lapangan mengenai peran pemerintah desa dalam pengembangan desa wisata kampung majapahit bejijong. Subjek penelitian ini ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, dimana subjek penelitian ditentukan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun subjek penelitian ini yaitu Kepala Desa Bejijong, Sekretaris dan Staff Pemerintah Desa Bejijong, Ketua Lembaga Desa Wisata, Masyarakat Desa Bejijong, Pengunjung Desa Wisata Kampung Majapahit. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh secara langsung di lapangan melalui wawancara dengan informan, observasi, dan dokumentasi terkait peran pemerintah desa dalam pengembangan desa wisata kampung majapahit. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh secara tidak langsung melalui literatur dan buku. Setelah data dikumpulkan, kemudian data akan dilakukan analisis secara sistematis menggunakan model dari Miles dan Huberman, dimana proses analisis data terdiri dari beberapa tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengembangan desa wisata kampung majapahit merupakan langkah awal untuk membangun kesejahteraan masyarakat desa melalui penguatan aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Pengembangan desa wisata tidak hanya mencerminkan kemampuan masyarakat desa dalam mengelola potensi dan sumber daya yang ada, namun juga adanya keterlibatan partisipasi aktif oleh pemerintah desa. Pengembangan desa wisata juga merupakan wujud dari semangat pemberdayaan yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, dimana menempatkan desa sebagai pelaku pembangunan.

Peran pemerintah desa menjadi penting dalam pengembangan desa wisata. Hasil dari penelitian terkait peran pemerintah Desa Bejjong dalam perwujudan pengembangan desa wisata kampung majapahit yang telah diuraikan di atas kemudian akan dibahas menggunakan keenam indikator peran menurut Ife Tesoriero, (2005) dalam Susanti, (2015) yang dikaitkan dengan analisis pengembangan desa wisata kampung majapahit berdasarkan teori Buhalis, (2000) dalam Chaerunissa, (2020). Hal ini memiliki beberapa prinsip yang dianalisis sebagai berikut :

Peran dalam animasi sosial

Animasi sosial merupakan bentuk nyata dari peran serta warga dalam proses pembangunan yang mencakup tahap, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, dengan tujuan untuk mewujudkan hasil yang berkelanjutan (Bosbuni & Ma'ruf 2021). Dengan begitu pemerintah desa memiliki wewenang untuk memberdayakan masyarakat dengan mengajak ikut serta dalam pengembangan desa wisata kampung majapahit.

a) Atraksi (*Attraction*)

Pemerintah Desa Bejjong sebagai animasi sosial tentunya memiliki peran dalam pengembangan desa wisata kampung majapahit. Dengan mendorong masyarakat melestarikan budaya yang tidak hanya menjadi penjaga warisan, namun masyarakat juga menjadi pelaku aktif dalam mempertahankan dan menyajikan secara langsung kepada wisatawan, yaitu atraksi wisata. Dengan itu pemerintah Desa Bejjong menetapkan sebagai desa wisata kampung majapahit bejjong melalui surat Keputusan kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Mojokerto. Untuk mendukung berjalannya desa wisata, pemerintah Desa Bejjong membentuk lembaga yang masih dalam naungan BUMDes Wijaya, yakni Lembaga Desa Wisata (Ladewi) dengan tujuan untuk menaungi unit usaha desa wisata kampung majapahit bejjong. Namun, dalam atraksi wisata ini kesadaran dan partisipasi masyarakat belum merata.

b) Aktivitas (*Activity*)

Dalam kegiatan desa wisata kampung majapahit terdapat aktivitas seni yang dapat dikembangkan menjadi atraksi wisata edukasi dan menjadi suatu pengalaman yang menarik bagi wisatawan, seperti pembuat kerajinan cor kuningan, wayang kulit, telur asin asap, membatik dan pertunjukan tari. Pemerintah Desa Bejjong membangkitkan energi masyarakat agar ikut serta dalam menyediakan aktivitas wisata yang juga merupakan kegiatan sehari-hari mereka. Terdapat salah satu aktivitas wisata yang masih belum aktif kembali yaitu pasar rakyat. Pemerintah desa masih merencanakan mengaktifkan kembali dengan tujuan pemulihan ekonomi desa lewat aktivitas wisata ini.

c) Akomodasi (*Accommodation*)

Pengembangan akomodasi pada desa wisata kampung majapahit ini menjadikan rumah majapahit yang merupakan hibah dari pemerintah provinsi untuk difungsikan sebagai homestay. Pemerintah Desa Bejjong mendorong masyarakat yang mendapatkan hibah dengan gaya khas rumah majapahit agar dijadikan homestay.



Gambar 1 Rumah majapahit
Sumber : Dokumentasi peneliti

Namun masih banyak masyarakat yang belum tertarik untuk ikut serta, dikarenakan sebagian rumah masih terbatas dan masih ragu akan keuntungan yang didapat.

d) Aksesibilitas (Accessibilty)

Pengembangan aksesibilitas pada desa wisata kampung majapahit bejijong bisa dikatakan sudah cukup strategis dan mudah dijangkau. Namun, kebersihan lingkungan dan kesiapan masyarakat dalam menerima wisatawan menjadi salah satu tantangan. Hal ini pemerintah Desa Bejijong terus melakukan edukasi pada masyarakat bahwa hal ini merupakan aspek penting dalam menunjang keberhasilan desa wisata.

e) Fasilitas pendukung (Amenities)

Selain itu, pengembangan fasilitas pada desa wisata kampung majapahit bejijong, seperti fasilitas swalayan, ATM, toilet umum, tempat makan dan tempat ibadah sudah tersedia.



Gambar 2 Pujasera Buddha Tidur

Sumber : Dokumentasi peneliti, 08 Mei 2025

Namun, banyak stand makanan yang tidak buka karena dianggap kurang laku. Pemerintah desa masih perlu menunjukkan peran pada masyarakat agar termotivasi akan minat dan kesadaran dalam berwirausaha.

f) Layanan pendukung (Ancillary services)

Pada pengembangan layanan pendukung desa wisata kampung majapahit. Pemerintah Desa Bejijong membentuk lembaga yang mengatur dan menjalankan program wisata, baik dalam mengajak masyarakat untuk menjadi pemandu juga dalam membuat paket wisata. Namun banyak pemandu wisata yang belum aktif, dikarenakan kurangnya tindak lanjut, arahan, dan promosi yang baik. Sehingga masih diperlukan pendampingan lebih lanjut. Hal tersebut tidak sejalan dengan prinsip pemberdayaan masyarakat, yakni akibat yang merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat perlu memberikan dampak positif dan manfaat nyata, karena pengalaman yang menyenangkan atau tidak akan memengaruhi motivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan serupa di masa depan. Sehingga jika dilihat dari prinsip pemberdayaan, masih banyak masyarakat yang belum merasakan manfaat secara langsung dari keterlibatan mereka.

Peran dalam mediasi dan negosiasi

Peran pemerintah Desa Bejijong dalam mediasi dan negosiasi merupakan peran dalam menjalankan fungsi sebagai mediator dan negosiator untuk menjembatani kelompok yang memiliki konflik (Ife dan Tesoriero, 2005 dalam Susanti, 2015). Hal tersebut juga sesuai dengan peran pemerintah sebagai katalisator yang berfungsi sebagai stimulat untuk mempercepat pembangunan potensi desa (Utami & Meirinawati, 2023).

a) Atraksi (*Attraction*)

Pengembangan atraksi pada desa wisata kampung majapahit. Pemerintah Desa Bejijong berperan aktif dalam menjalin komunikasi dan mengelola potensi konflik. Berikut peran pemerintah desa dalam memediasi dan negosiasi kelompok masyarakat.



Gambar 4 Rapat Koordinasi dengan Lembaga Adat Desa
Sumber : Website Desa Bejjong

Salah satunya adalah berkoordinasi dengan Yayasan Lumbini dan Dinas pariwisata juga dengan Balai Pelestarian Kebudayaan yang merupakan pengelola atraksi wisata Patung Buddha Tidur, Candi Brahu, dan Makam raden Wijaya (Siti Inggil). Agar dapat dijadikan paket wisata tanpa mengganggu fungsi sebagai tempat ibadah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa sudah menjalankan peran untuk pengembangan atraksi.

b) Aktivitas (Activity)

Pada pengembangan aktivitas desa wisata, pemerintah desa memediasi masyarakat juga generasi muda untuk menciptakan aktivitas wisata berbasis budaya. Berikut sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa.

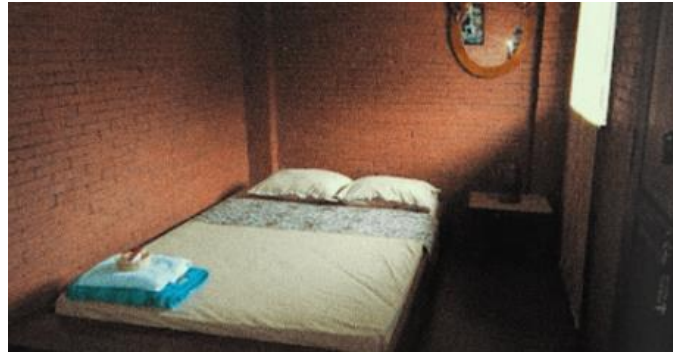


Gambar 5 Sosialisasi pariwisata kepada pemuda
Sumber : Web Desa Bejjong

Peran mediasi ini terlihat dari upaya pemerintah desa dalam menyatukan pelaku budaya dengan masyarakat umum untuk menyediakan aktivitas wisata edukatif. Selain aktivitas sehari-hari masyarakat dapat dijadikan atraksi wisata, hal ini juga menjadi salah satu upaya untuk regenerasi pelaku wisata.

c) Akomodasi (Accommodation)

Dalam pengembangan akomodasi, pada desa wisata ini sempat terjadi konflik antara pemilik rumah dengan pengelola terkait tarif harga penginapan. Beberapa pemilik rumah yang merupakan masyarakat Desa Bejjong merasa keberatan dengan standar harga yang ditetapkan, karena merasa fasilitas yang diberikan belum sesuai dengan harga yang ditetapkan. Sehingga pemerintah desa berperan aktif dalam menengahi konflik yang terjadi. Dengan membuat keputusan harga tetap dan membagi wisatawan agar semua homestay mendapat kesempatan yang adil.



Gambar 6 Homestay rumah majapahit
Sumber : Instagram Bejijongku

d) Aksesibilitas (Accessibilty)

Pengembangan aksesibilitas desa wisata, pemerintah desa menjalin komunikasi dengan pihak luar, yakni Kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif untuk pengadaan dua unit shuttle bus sebagai sarana transportasi dalam desa. Berikut shuttle bus yang dijadikan akses keliling desa wisata kampung majapahit.



Gambar 7 Shuttle bus
Sumber : Web Desa Bejijong

Namun akses dari pusat kota masih terbatas, pemerintah desa bernegosiasi dengan Dinas Perhubungan agar pengadaan rute Transjatim bisa menjangkau Desa Bejijong. Hal ini peran negosiasi pada pengembangan akses desa wisata masih terus diupayakan.

e) Fasilitas pendukung (Amenities)

Pengembangan fasilitas yang ada di desa wisata kampung majapahit bejijong. Pemerintah desa berperan untuk memediasi pelaku usaha dan pemilik lahan yakni Yayasan Lumbini agar memanfaatkan kios untuk digunakan secara optimal, seperti berjualan souvenir atau oleh-oleh. Selain itu, pemerintah desa juga bernegosiasi dengan Dinas Koperasi untuk memberikan bantuan gerobak usaha kepada UMKM untuk berwirausaha dan menyediakan fasilitas untuk desa wisata. Namun jumlah yang diberikan tidak sesuai dengan permintaan awal.

f) Layanan pendukung (Ancillary services)

Layanan pendukung desa wisata, pemerintah desa turut berperan dalam membina dan memediasi kelompok masyarakat yang bersedia menjadi pemandu wisata serta menjaga citra pelayanan yang ramah kepada pengunjung. Selain itu, pemerintah desa bekerja sama dengan Bang Rakyat Indonesia (BRI) melalui program QRIS pada pelaku UMKM. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan layanan pada saat transaksi di tempat makan daerah wisata.

Peran sebagai pemberi dukungan

Peran ini melalui dukungan pada kelembagaan, kebijakan, dan juga fasilitas pada kelompok masyarakat yang terlibat dalam pengembangan desa wisata kampung majapahit. Sesuai dengan peran pemerintah sebagai regulator menurut Raintung et al., (2021) bahwa peran regulator berarti memberikan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan dengan menerbitkan peraturan dalam rangka efektifitas pelaksanaan pembangunan. Dalam hal ini pemerintah Desa Bejijong memberi dukungan berupa kebijakan atau peraturan untuk mengembangkan desa wisata kampung majapahit.

a) Atraksi (Attraction)

Dalam pengembangan tersebut pemerintah desa bejijong aktif mendukung atraksi utama yakni Rumah majapahit, Candi Brahu, Patung Buddha Tidur, dan siti inggil. Dukungan yang diberikan melalui pembentukan lembaga desa wisata sebagai pengelola utama desa wisata. Hal ini menunjukkan komitmen

pemerintah desa dalam pengembangan wisata agar atraksi wisata lebih terstruktur dalam pengelolaannya.

b) **Aktivitas (Activity)**

Dalam aktivitas wisata, bentuk dukungan pemerintah desa terlihat dari pengesahan kelompok masyarakat yang ikut terlibat dalam aktivitas wisata, yakni paguyuban cor kuning Sabar Handayani. Pemerintah desa memberikan dukungan berupa kelembagaan agar aktivitas wisata bisa berkembang dan menjadi pengalaman wisata edukasi yang menarik.

c) **Akomodasi (Accommodation)**

Pada pengembangan akomodasi wisata, pemerintah desa memberi dukungan berupa kerja sama dengan pemilik rumah majapahit yang dijadikan homestay melalui perjanjian tertulis. Dalam perjanjian tersebut mengatur standar layanan, harga, dan juga sistem bagi hasil antara pemilik rumah dengan pihak pemerintah desa. Dengan demikian pengelolaan homestay menjadi teratur dan bermanfaat bagi semua pihak.

d) **Aksesibilitas (Accessibilty)**

Dukungan yang diberikan pemerintah desa pada aspek pengembangan aksesibilitas, berupa transportasi wisata shuttle bus. Dengan ini pemerintah desa memberikan dukungan berupa perjanjian kerja sama antara pengemudi dengan koordinator shuttle bus. Perjanjian tersebut menjelaskan terkait pembagian hasil, tanggungjawab perawatan, dan pengawasan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa berupaya untuk menjamin kenyamanan pelaku wisata juga wisatawan.

e) **Fasilitas pendukung (Amenities)**

Selain itu untuk mendukung kenyamanan wisatawan, pemerintah desa mendorong pelaku UMKM untuk menyediakan fasilitas pendukung yakni tempat makan dan oleh-oleh melalui kerja sama dengan Yayasan Lumbini yang merupakan pemilik lahan untuk memberikan tempat berjualan di pujasera majapahit. Selain itu bentuk dukungan yang diberikan berupa perjanjian kerja sama dengan BUMDes Wijaya untuk ketentuan kualitas produk, pembagian hasil untuk PAD, dan kewajiban BUMDes sebagai pembina dan pengawas. Namun dalam pelaksanaannya masih memerlukan penguatan baik dari pembinaan juga pengawasan.

f) **Layanan pendukung (Ancillary services)**

Pada pengembangan layanan pendukung wisata, pemerintah desa fokus untuk meningkatkan layanan melalui tourguide. Dengan memberikan pelatihan tourguide yang bersertifikat supaya pelayanan yang diberikan lebih maksimal.



Gambar 8 Pelatihan tourguide

Sumber : Web desa bejijong

Selain itu, pemerintah desa juga membentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dengan tujuan promosi dan menyebarluaskan informasi mengenai desa wisata kampung majapahit. Kelompok tersebut dibentuk melalui Surat Keputusan Kepala Desa Bejijong, hal ini menunjukkan dukungan pada kelompok masyarakat yang ikut terlibat dalam pengembangan layanan desa wisata.

Peran dalam fasilitasi kelompok

Peran pemerintah Desa Bejijong dalam memberikan fasilitas kepada setiap kelompok pelaku wisata yang dapat mengembangkan desa wisata kampung majapahit. Sesuai dengan peran pemerintah sebagai fasilitator, dimana pihak yang menjembatani dan penyedia sarana dan prasarana (Utami & Meirinawati, 2023). Dalam hal ini sarana dan prasarana tersebut dibangun dengan tujuan untuk meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan agar desa wisata kampung majapahit dapat bermanfaat menyejahterakan masyarakat sekitar.

a) **Atraksi (Attraction)**

Dalam pengembangan atraksi wisata, pemerintah Desa Bejjong memiliki keterbatasan dalam mengelola sebagian objek wisata utama, yakni Patung Buddha Tidur dan Candi Brahu. Hal ini dikarenakan atraksi wisata tersebut dikelola oleh pihak eksternal. Oleh karena itu, pemerintah Desa Bejjong tidak berperan dalam pembangunan fisik bahkan sarana dan prasarana di dalam atraksi tersebut. Namun demikian, pemerintah Desa Bejjong berperan secara tidak langsung dengan membuat paket wisata. Paket wisata ini mencakup kunjungan ke beberapa atraksi wisata sekaligus, sehingga dapat meningkatkan wisatawan dan memberikan kontribusi bagi pengelola masing-masing atraksi.

b) Aktivitas (Activity)

Pada aktivitas wisata, pemerintah desa memberikan fasilitas pada pelaku wisata edukatif yakni kerajinan cor kuningan berupa pinjaman modal, kemudian pada aktivitas pasar rakyat yang memang masih belum terlaksana lagi, namun pemerintah desa menyiapkan dukungan berupa tenda stand untuk pelaku UMKM. Selain itu, pada kelompok seni tari difasilitasi ruang dengan memanfaatkan balai desa untuk kegiatan.

c) Akomodasi (Accommodation)

Fasilitas pada pengembangan akomodasi wisata di desa wisata kampung majapahit masih terkendala karena keterbatasan fisik dan fasilitas dasar seperti kamar mandi, sehingga menjadikan layanan homestay belum maksimal. Namun pemerintah desa tidak dapat memberikan bantuan fasilitas secara langsung karena keterbatasan anggaran dan masih mengajukan bantuan untuk mendukung pengembangan sarana dan prasarana homestay.



Gambar 9 Fasilitas homestay
Sumber : Instagram bejjongku

d) Aksesibilitas (Accessibilty)

Dalam aksesibilitas, pemerintah desa memfasilitasi dengan melakukan perbaikan jalan, pemasangan petunjuk arah, dan penyediaan lampu jalan. Dengan tujuan memberikan kenyamanan bagi wisatawan yang berkunjung. Namun, masih terdapat beberapa jalur yang tidak memadai, seperti jalur belakang yang memang menjadi salah satu akses menuju desa wisata tidak memiliki plang khusus.



Gambar 9 Akses belakang menuju desa wisata
Sumber : Dokumentasi peneliti, 2025

Hal ini menunjukkan pengembangan aksesibilitas belum dilakukan secara menyeluruh.

e) Fasilitas pendukung (Amenities)

Fasilitas pendukung pada desa wisata kampung majapahit ini memang sudah tersedia seperti tempat makan (pujasera), pusat oleh-oleh, namun sebagian besar difasilitasi oleh pihak eksternal yakni Yayasan Lumbini. Pemerintah desa berperan dalam pemberdayaan masyarakat untuk pelaku UMKM dengan memberikan pinjaman modal. Selain itu belum tersedianya workshop guna menampilkan hasil produk kerajinan, sehingga edukasi yang diberikan pada wisatawan masih dilakukan di rumah masing-masing warga. Sehingga perlu adanya ruang publik untuk menjadi daya tarik dan promosi produk wisata.

f) Layanan pendukung (Ancillary services)

Pengembangan layanan pendukung pada desa wisata kampung majapahit ini kurangnya fasilitasi pada layanan pusat informasi dan rest area. Pemerintah Desa Bejjong memfasilitasi kantor balai desa untuk dijadikan sebagai titik kumpul dan memperoleh informasi bagi wisatawan. Tentunya hal ini kurang memberikan kenyamanan bagi wisatawan.

Peran dalam pemanfaatan sumber daya dan keterampilan

Peran dalam memanfaatkan sumber daya dan keterampilan yang dimiliki masyarakat. Pemerintah desa sebagai pemberdaya harus mampu mengoptimalkan potensi sumber daya dan keterampilan masyarakat untuk mengembangkan desa wisata kampung majapahit. Sesuai dengan Musgrave, (1991) dalam Muluk, (2009) menjelaskan bahwa peran pemerintah dalam fungsi alokasi berarti pemerintah bertindak sebagai pelaksana kebijakan dalam penyediaan barang dan jasa publik, dengan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pengalokasian sumber daya secara optimal dan efisien. Dalam hal ini pemerintah desa memanfaatkan potensi sumber daya yang ada untuk mengembangkan desa wisata kampung majapahit.

a) Atraksi (Attraction)

Dalam atraksi wisata, meskipun pemerintah desa tidak sepenuhnya mengelola dan mengatur secara langsung dalam pengembangannya, tetapi pemerintah desa memanfaatkan potensi atraksi wisata tersebut dengan menjual paket yang sekaligus dapat berkunjung ke beberapa destinasi yang ada.



Gambar 3 Paket Wisata
Sumber : Instagram Bejjongku

b) Aktivitas (Activity)

Pengembangan aktivitas wisata, pemerintah desa memanfaatkan aktivitas keseharian warga seperti membuat batik, membuat cor kuning, dan tari tradisional untuk dijadikan bagian dari paket wisata edukatif yang nantinya akan memberikan pengalaman menarik bagi wisatawan. Namun dalam pelaksanaannya masih memerlukan pengelolaan yang lebih terstruktur agar wisatawan dapat merasakan pengalaman baik. Terutama terkait makanan khas ayam kemaron yang memang belum terkemas secara praktis dan sistem pemesanan masih by order, sehingga pemerintah desa dapat memanfaatkan hal tersebut ke dalam paket aktivitas wisata memasak.



Gambar 10 Kuliner khas ayam kemaron
Sumber : web desa bejijong

c) Akomodasi (Accommodation)

Pada pengembangan akomodasi pada desa wisata kampung majapahit ini, pemerintah Desa Bejijong memanfaatkan rumah majapahit yang merupakan hibah dari pemerintah provinsi untuk dijadikan sebagai homestay atau kegiatan ekonomi lainnya. Selain itu rumah majapahit menjadi salah satu ikon desa wisata ini, meskipun masih diperlukan pendekatan lebih agar banyak masyarakat yang ikut berpartisipasi pada desa wisata.

d) Aksesibilitas (Accessibilty)

Pengembangan aksesibilitas, Desa wisata kampung majapahit ini terletak sangat strategis karena berada pada jalur wisata trowulan. Sehingga pemerintah desa melakukan perbaikan infrastruktur agar lebih nyaman bagi wisatawan. Selain itu pemerintah desa mencoba untuk mengembangkan akses digital pada desa wisata kampung majapahit ini, agar desa wisata ini mudah untuk diakses secara online. Namun hal tersebut belum terlaksana dan masih memerlukan pendampingan bagi pelaku wisata.

e) Fasilitas pendukung (Amenities)

Fasilitas pendukung desa wisata kampung majapahit, sudah memanfaatkan pelaku UMKM untuk diberikan pelatihan dan modal usaha melalui BUMDes. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keahlian masyarakat dan mampu menciptakan produk unggulan desa.

f) Layanan pendukung (Ancillary services)

Layanan, pemerintah Desa Bejijong memanfaatkan sumber daya dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk peningkatan kualitas layanan wisata pada tourguide, khususnya pelayanan pada wisatawan asing. Namun dalam pelaksanaannya masih diperlukan pendampingan aktif agar bisa memanfaatkan hasil pelatihan secara optimal.

Peran dalam mengorganisasi

Peran pemerintah desa dalam mengorganisasi serta melibatkan kemampuan kelompok masyarakat untuk berpikir tentang hal apa saja yang perlu dilakukan dalam pengembangan desa wisata kampung majapahit bejijong. Tentunya sebagai organisator, pemerintah desa harus mengarahkan, membentuk, mengatur, dan mengelola kelompok masyarakat yang terlibat dalam pelaku wisata dengan tujuan agar tercipta pemberdayaan. Hal tersebut juga sesuai dengan peran pemerintah sebagai koordinator menurut Nilawati et al., (2021) menjelaskan bahwa pemerintah memiliki peran dalam merumuskan kebijakan atau strategi pembangunan daerah serta mendorong keterlibatan seluruh elemen masyarakat untuk turut serta sebagai pelaku aktif dalam proses pembangunan tersebut.

a) Atraksi (*Attraction*)

Pengembangan atraksi di desa wisata kampung majapahit, pemerintah Desa Bejijong belum sepenuhnya berperan dalam mengorganisasi kelompok atraksi wisata. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar atraksi wisata yang tersedia di desa wisata kampung majapahit merupakan milik pihak luar yakni Yayasan Lumbini dan Dinas kebudayaan dan pariwisata juga oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB). Dalam hal atraksi wisata, tentunya pemerintah Desa Bejijong mampu mengorganisasi namun bersifat terbatas, yakni hanya dalam penyusunan paket wisata.

b) Aktivitas (*Activity*)

Dalam pengembangan aktivitas wisata seperti membatik, menari, cor kuning, dan pembuatan telur asin asap. Pemerintah Desa mengorganisasi melalui lembaga yang sudah dibentuk, sehingga lembaga tersebut yang mengkoordinasi unit usaha dibawahnya yang merupakan aktivitas wisata edukasi. Sehingga hanya memfasilitasi ruang musyawarah untuk penyesuaian visi misi yang ada.

c) Akomodasi (Accommodation)

Pengembangan rumah majapahit yang merupakan akomodasi desa wisata. Masih terdapat perbedaan pendapat antara pengelola homestay dengan pemilik rumah, karena terdapat perbedaan harga sehingga membuat pemilik menjalankan akomodasi sendiri tanpa ada perjanjian dengan pemerintah desa yang dimana pendapatan yang diperoleh tidak masuk ke desa. Sehingga hal ini, peran pemerintah desa dalam mengorganisasi pengembangan akomodasi masih lemah.

d) Aksesibilitas (Accessibilty)

Pengembangan aksesibilitas secara digital seperti pembuatan website agar lebih mudah untuk diakses oleh wisatawan. Hal tersebut diinisiasi oleh Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), namun pelaku wisata yang merupakan lembaga desa wisata menolak dikarenakan keterbatasan usia sehingga merasa rumit dengan adanya akses digital tersebut. Sehingga perlu adanya pendampingan lebih lanjut untuk lembaga desa yang terlibat dalam desa wisata.

e) Fasilitas pendukung (Amenities)

Fasilitas pendukung tentunya dalam hal menyediakan tempat makan. Pemerintah desa telah menyediakan berupa pujasera dan memberikan pelatihan juga modal pada pelaku usaha makanan. Meskipun pemerintah desa sudah membuat perjanjian yang tertuang dengan pelaku UMKM yang berjualan di pujasera majapahit, namun masih banyak masyarakat yang tidak memanfaatkan itu. Sehingga peran pemerintah desa masih lemah dalam mengorganisasi pelaku usaha, karena kurang terikat terhadap kebijakan yang ada.

f) Layanan pendukung (Ancillary services)

Layanan pendukung dengan pemerintah desa membentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dengan tujuan promosi digital melalui website seperti djalani.com serta mendatangkan influencer untuk mempromosikan desa wisata kampung majapahit. Namun hal tersebut masih tidak berdampak pada peningkatan kunjungan wisata. Sehingga masih memerlukan strategi untuk promosi yang lebih menarik.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan di lapangan dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah Desa Beji Jong dalam pengembangan desa wisata kampung majapahit melalui enam aspek, yaitu peran animasi sosial, mediasi dan negosiasi, pemberi dukungan, fasilitas kelompok, pemanfaatan sumber daya dan keterampilan, dan mengorganisasi pada aspek pengembangan desa wisata kampung majapahit beji Jong.

Peran sebagai animasi sosial Pemerintah Desa Beji Jong mendorong partisipasi masyarakat melalui pembentukan lembaga seperti Ladewi. Masyarakat mulai dilibatkan dalam atraksi budaya, namun keterlibatannya belum merata dan belum semua warga merasakan manfaat langsung. Pengelolaan homestay masih terbatas, aksesibilitas cukup baik namun kebersihan dan kesiapan warga perlu ditingkatkan. Fasilitas pendukung sudah tersedia tetapi belum dimanfaatkan secara optimal, dan promosi serta layanan wisata masih belum berjalan maksimal.

Peran sebagai mediator dan negosiator, pemerintah desa berperan dalam menjembatani konflik antar kelompok serta membangun kerja sama dengan Dinas Pariwisata, Balai Pelestarian Kebudayaan, dan Yayasan Lumbini. Mereka juga memediasi konflik tarif homestay, mengupayakan pengadaan shuttle bus, memperluas rute Trans Jatim, serta memfasilitasi UMKM dan pembinaan pemandu wisata. Namun, peran ini masih perlu diperkuat dengan forum resolusi konflik yang efektif dan dokumen kerja sama yang transparan.

Peran sebagai pemberi dukungan, pemerintah desa telah membentuk lembaga desa wisata, mendukung kegiatan seni dan kerajinan, serta menjalin kerja sama dalam pengelolaan akomodasi dan fasilitas pendukung seperti pujasera. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) juga dibentuk sebagai sarana informasi. Meskipun dukungan telah diberikan, distribusinya belum merata, terutama pada homestay dan standarisasi tour guide, sehingga diperlukan evaluasi dan pembentukan serikat pelaku wisata.

Peran sebagai fasilitasi kelompok, pemerintah desa memberikan bantuan modal kepada pengrajin dan menyediakan ruang latihan seni. Namun, fasilitas homestay masih terbatas karena kendala anggaran. Perbaikan jalan dan petunjuk arah belum merata, dan layanan informasi wisata belum tersedia. Digitalisasi juga menghadapi hambatan dari kelompok usia tua, sehingga diperlukan ruang multifungsi dan pendekatan lintas generasi dengan melibatkan pemuda dalam pengelolaan wisata berbasis digital.

Peran dalam pemanfaatan sumber daya dan keterampilan, potensi lokal dimaksimalkan melalui kegiatan wisata edukatif seperti batik, kerajinan, dan tari. Rumah Majapahit dimanfaatkan sebagai ikon wisata dan homestay, meskipun belum optimal. Infrastruktur fisik telah ditingkatkan, namun akses digital belum terealisasi. UMKM mendapat pelatihan dan modal, serta kerja sama dilakukan dengan perguruan tinggi untuk peningkatan kualitas tour guide. Namun, masih banyak potensi seperti rumah kosong dan produk unggulan ayam kemaron yang belum dimanfaatkan secara maksimal.

Peran dalam mengorganisasi, pemerintah desa telah membentuk lembaga, menyusun paket wisata, dan memberikan fasilitas kepada UMKM. Namun, kelemahan dalam koordinasi kelompok, minimnya

pemanfaatan teknologi, dan rendahnya kedisiplinan masyarakat menjadi tantangan. Oleh karena itu, perlu penguatan organisasi seperti Pokdarwis, pendampingan berkelanjutan, serta strategi promosi yang lebih efektif dan menyeluruh.

Dengan demikian, peran pemerintah Desa Bejjong sudah cukup aktif dalam pengembangan desa wisata kampung majapahit. Namun dalam pelaksanaannya peran tersebut belum terlaksana secara menyeluruh dan merata pada semua aspek pengembangan wisata.

SARAN

Saran dan masukan yang dapat peneliti sampaikan kepada pemerintah Desa Bejjong Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto dalam penelitian yang berjudul peran pemerintah desa dalam pengembangan desa wisata di Kabupaten Mojokerto (Studi pada desa wisata kampung majapahit Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto).

1. Melibatkan semua masyarakat dalam kegiatan wisata dengan pendekatan berbasis komunitas
2. Perlunya regulasi untuk mengatur kegiatan wisata
3. Perlunya fasilitas untuk semua kelompok wisata
4. Melakukan pendampingan secara rutin
5. Meningkatkan koordinasi dan promosi digital
6. Pembentukan serikat tourguide dan juga homestay untuk mempermudah menindaklanjuti kelompok tersebut
7. Melakukan pendekatan lintas generasi yakni melibatkan kelompok pemuda dalam pengelolaan platform digital, media sosial, dan website.
8. Memanfaatkan rumah majapahit yang kosong untuk dijadikan fasilitas yang sebelumnya belum tersedia, seperti pusat informasi dan juga workshop.
9. Memanfaatkan produk ayam kemaron yang belum dikemas secara praktis untuk dimasukkan ke dalam paket wisata, seperti aktivitas memasak.
10. Mengoordinasi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang lebih jelas terkait peran kelompok tersebut.

REFERENSI

- Adisasmita, R. (2006). *Pembangunan pedesaan dan perkotaan*. Graha Ilmu.
- Ayuningtyas, D., Lestari, H., & Rostyaningsih, D. (2023). *PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA EDUKASI GERABAH*.
- Bobsuni, N., & Ma'ruf, M. F. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Objek Wisata Alam (Studi Kasus Wisata Bukit Kapur Setigi, Desa Sekapuk, Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik). *Publika*, 215–226.
- Christanto, G. (2020). *PERSPEKTIF CUSTOMER EXPERIENCE DALAM PENGELOLAAN RUMAH MAJAPAHIT DESA BEJJONG DI MOJOKERTO*.
- Creswell, J. W. & C. J. D. (2018). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approach*. In *Writing Center Talk over Time*. <https://doi.org/10.4324/9780429469237-3>
- Fahira, N. S., Umar, R., & Habibi, M. M. (2022). Peran pemerintah Desa Purworejo dalam pengembangan wisata alam Sumber Complang Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri. *Jurnal Integrasi Dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(3), 291–303. <https://doi.org/10.17977/um063v2i32022p291-303>
- Fandeli Chafid. (2001). *Dasar-dasar manajemen kepariwisataan alam*. Penerbit Liberty.
- Hadiwijoyo, S. S. (2012). *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat (Sebuah Pendekatan Konsep)*. Yogyakarta : Graha Ilmu. <https://grahailmu.co.id/previewpdf/978-979-756-894-8-914.pdf>
- Horton, P. B. dan C. L. H. (1999). *Sosiologi jilid 1*. Erlangga.
- Kemenparekraf/Baparekraf RI. (2023, June 1). *Siaran Pers: Menparekraf Paparkan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2024 Kemenparekraf Rp3,4 Triliun*. Kemenparekraf.Go.Id. <https://www.kemenparekraf.go.id/berita/siaran-pers-menparekraf-paparkan-pagu-indikatif-tahun-anggaran-2024-kemenparekraf-rp34-triliun>
- Khotimah, I. (2017). *PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN DESA*.
- Koenjoro, D. H. (2004). *Hukum administrasi negara* (R. Agustin, Ed.; 2004th ed.). Ghalia Indonesia.
- Moloeng, L. (2007). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosada Karya.
- Muluk, M.R Khairul. 2009. *Peta Konsep Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Surabaya: ITS Press.
- Musanef. (1995a). *Manajemen usaha pariwisata di Indonesia*. Gunung Agung.
- Nilawati, N., Mahsyar, A., & Tahir, M. (2021). Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Kerusakan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Bone. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 2(5), 1858–1873.
- Nur Inayah, S. (2023). *PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA*.
- Pendit, N. S. (1999). *Ilmu pariwisata : sebuah pengantar perdana*. PT. Pradnya Paramita.

- Priasukmana, S. dan R. M. M. (2001). PEMBANGUNAN DESA WISATA : PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG OTONOMI DAERAH. *Info Sosial Ekonomi* , 2, 37–44.
- Raintung, A., Sambiran, S., & Sumampow, I. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. *Journal Governance*, 1(2), 1–9.
- R.Bintarto. (2010). *Desa Kota*. Alumni.
- Rochim, A. (2018). *PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA PUJON KIDUL (Studi pada Desa Wisata Pujon Kidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang)* SKRIPSI Diajukan untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- Sahyana, Y. (2017). *PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (STUDI PADA DESA SUKAMULYA KECAMATAN PAKENJENG KABUPATEN GARUT PROVINSI JAWA BARAT)*.
- Saparin. (1979). *Tata pemerintahan dan administrasi pemerintahan desa*. Ghalia Indonesia .
- Shafira, O. :, Chaerunissa, F., & Yuniningsih, T. (2020). *ANALISIS KOMPONEN PENGEMBANGAN PARIWISATA DESA WISATA WONOLOPO KOTA SEMARANG*.
- Siagian, S. P. (2000). *Administrasi pembangunan konsep, dimensi, dan strateginya*. Bumi Aksara.
- Soekanto, S. (2002). *Teori Peranan*. Bumi Aksara.
- Sopyan, M., Nursetiawan, I., & Garis, R. R. (2024). Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Objek Wisata Pasir Bentang di Desa Sukamnah Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis. In *Mutiara Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* (Vol. 2, Issue 3). <https://jurnal.tiga-mutiara.com/index.php/jimi/index>
- Spillane James J. (1994). *Pariwisata Indonesia: siasat ekonomi dan rekayasa kebudayaan* (Vol. 5). Penerbit Kanisius.
- Sugiana, A. G. (2011). *Ecotourism: Pengembangan Pariwisata berbasis konservasi alam*. Bandung: Guardaya Intimarta.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Susanti, S. (2015). *PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA SUKAMAJU KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG*.
- Susilo, S. (2008). Penilaian Ekonomi Desa Wisata Kasus : Desa Kepuharjo, Sleman, Yogyakarta. *Jurnal OPTIMAL*, 6 Nomor 1.
- Sutarto. (2009). *Dasar-dasar organisasi*. UGM Press.
- Takome, S., Suwu, E., & Zakarias, J. (2021). Dampak Pembangunan Pariwisata Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Lokal Di Desa Bobanehena Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat. *JURNAL ILMIAH SOCIETY*, 1, 4–15.
- Tjokroamidjojo, B. (1995). *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Pustaka LP3ES.
- Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009*. (n.d.).
- Utami, R. N., & Meirinawati, M. (2023). Analisis Peran Bumdes Ngingas Makmur Abadi Dalam Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah (Ikm) Di Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. *Publika*, 11, 2585–2592. <https://doi.org/10.26740/publika.v11n4.p2585-2592>
- Yoeti, O. (2008). *Ekonomi pariwisata: introduksi, informasi, dan implementasi*. Penerbit Buku Kompas.
- Yusuf Syaifudin, M., & Farid Ma, M. (2022). *Peran Pemerintah Desa dalam ... PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI DESA WISATA (studi di Desa Jurug Kabupaten Ponorogo)*.
- Zata Lini, A. (2024). *Peran Pemerintah Desa Bukit Batu Dalam Pengembangan Desa Wisata di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis*.